

POLITIK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN

Febrianto Wisnu Wardhana

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Political Development in Rural Areas. The last three years have a wide range of rural infrastructure development program has been a lot that goes into the village of Batu Gajah, from PNPM Mandiri until funds from the Village Fund (ADD) for infrastructure development have been disbursed. However, the infrastructure development for three years, was impressed concentrated in some villages point only, meaning not occur even development. This study aims to how the political role of the village head in infrastructure development and what the village chief consideration in selecting the location of infrastructure development in the village of Batu Gajah Pasir Penyau Indragiri Hulu. The research method used descriptive qualitative approach which aims to determine the development of certain physical means or frequency occur a sapek certain social phenomena. The results showed the political role of the village head in infrastructure development in the village of Batu Gajah consists of five roles that Mediator Development, Development motivator, facilitator, Development, Policy and empowerment facilitator Facilitator. The impact caused the political role of the village chief Batu Gajah in infrastructure development is the first, the development gap between rural hamlet in Batu Gajah, where Hamlet II since 2011 almost no development. Second, the negative perception of residents in the Hamlet III to the village chief as a result of the absence of such development, the Third, their distrust (distrust) portion of the society against the chief. Fourth, a positive perception of the other village infrastructure development smoothly since the last five years. Fifth, BPD is dominated by the village chief.

Abstrak: Politik Pembangunan di Perdesaan. Tiga tahun terakhir ini berbagai macam program pembangunan infrastruktur desa telah banyak yang masuk ke Desa Batu Gajah, mulai dari PNPM Mandiri sampai dana Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur telah dikucurkan. Namun pembangunan infrastruktur tersebut selama tiga tahun ini terkesan terkonsentrasi di beberapa titik desa saja, artinya tidak terjadi pemerataan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana peranan politik kepala desa dalam pembangunan infrastruktur dan apa pertimbangan kepala desa dalam memilih lokasi pembangunan infrastruktur di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadi suatu sapek fenomena sosial tertentu. Hasil penelitian menunjukkan peranan politik kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Batu Gajah terdiri atas lima peranan yakni Mediator Pembangunan, Motivator Pembangunan, Fasilitator, Pembangunan, Fasilitator Kebijakan dan Fasilitator Pemberdayaan. Dampak yang terjadi akibat adanya peranan politik Kepala Desa Batu Gajah dalam pembangunan infrastruktur adalah *pertama*, terjadinya kesenjangan pembangunan antar dusun di desa Batu Gajah, dimana Dusun II sejak tahun 2011 hampir tidak ada pembangunan. *Kedua*, Persepsi negatif dari warga yang ada di Dusun III terhadap Kepala Desa akibat tidak adanya pembangunan tersebut, *Ketiga*, adanya *distrust* (ketidakpercayaan) sebagian kelompok masyarakat terhadap Kepala Desa. *Keempat*, persepsi positif dari dusun lain yang pembangunan infrastrukturnya lancar sejak lima tahun terakhir ini. *Kelima*, BPD didominasi oleh Kepala Desa.

Kata Kunci: kepala desa, politik pembangunan, pembangunan infrastruktur

PENDAHULUAN

Berbagai macam program pembangunan infrastruktur desa telah banyak yang masuk ke Desa Batu Gajah, mulai dari PNPM Mandiri sampai dana Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur telah dikucurkan. Namun pembangunan infrastruktur tersebut selama tiga tahun ini terkesan terkonsentrasi di beberapa titik desa saja. Artinya pemerataan pembangunan di Desa Batu Gajah ada kesan “pilih

kasih” oleh Kepala Desa dengan memanfaatkan posisi politiknya yang strategis untuk mengambil sebuah keputusan. Ketidakmerataan lokasi pembangunan di Desa Batu Gajah sejak awal tahun 2011 sudah terlihat, yang mana pada tahun ini dimulainya kepemimpinan kepala desa.

Dari empat pembangunan yang dilakukan, hanya Dusun III yang tidak masuk dalam pembangunan. Sementara Dusun lain seperti Dusun I dan Dusun IV mendapat pembangunan yang

terus berlanjut pada tahun berikutnya. Kondisi demikian akan terus terjadi selama tulisan ini berlangsung, dan diprediksi akan terus berlanjut sampai jabatan Kepala Desa saat ini berakhir pada tahun 2018. Penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terutama mengenai peran Kepala Desa dalam memilih lokasi pembangunan infrastruktur sekaligus menelaah apakah pemilihan lokasi pembangunan tersebut berdasarkan analisa kepentingan masyarakat desa.

Politik pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari peran elit desa. Kelompok-kelompok elit ini sifatnya sangat heterogen (Surbakti, 1999). Mereka terdapat dalam komunitas agama, politik, ekonomi, adat, dan sebagainya. Kedudukan mereka sebagai ekit bisa berubah sesuai dengan situasi dan dengan siapa mereka mengadakan interaksi. Pola interaksi, akomodasi, konflik dan lain sebagainya (Widjaja, 1988). Mereka ini ada yang berstatus elit formal maupun elit informal. Dalam konteks pedesaan, elit formal adalah para elit yang mempunyai kedudukan resmi dalam struktur pemerintahan desa, seperti kepala desa, kepala hansip, ketua RW dan ketua RT. Sedangkan elite informal adalah mereka yang mempunyai pengaruh yang diakui sebagai pemimpin oleh sebuah kelompok tertentu maupun oleh masyarakat desa seluruhnya meskipun tidak menduduki posisi resmi dalam pemerintahan desa (Sumitro, 2006).

Seorang kepala desa, mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar untuk mengatur rakyatnya. Kepala desa adalah patron bagi masyarakat desa. Agar kepala desa mampu mempertahankan kekuasaan dan wewenangnya, ia selalu mencari kekuatan legitimasi kedudukannya dengan cara mengaitkan dirinya secara geneologis dengan pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam kasus pengaitan geneologis ini juga dilakukan dengan nenek moyangnya yang pernah menjadi kepala desa dahulu (Haris, 1998). Pengaitan secara geneologis ini dimaksudkan untuk memperkuat perannya dalam memegang kekuasaan dan wewenang. Sebab tanpa legitimasi tersebut, maka perannya sebagai pemimpin tertinggi desa akan hilang.

Pada proses pembangunan desa, peran kepala desa juga sangat besar. Menurut penga-

matan Hofsteede (1992) terhadap peran kepala desa di 4 desa di Jawa Barat membuktikan hal itu. Para kepala desa yang diteliti menunjukkan bahwa mereka sebagai pengambil prakarsa dalam suatu proyek pembangunan. Mereka mendiskusikan dan seterusnya merapatkan dalam rapat desa untuk mengambil keputusan pelaksanaan suatu proyek. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peran kepala desa demikian besar, yaitu pertama, kepala desa di kebanyakan desa mempunyai wewenang yang betul-betul nyata. Mereka bagaikan raja-raja kecil di desanya. Hal itu ditambah sikap masyarakat yang bersifat patenalistik. Kedua, kepala desa mempunyai posisi yang kuat sebagai wakil pemerintah di desa. Hal ini karena bupatilah yang membuat keputusan akhir dan memberi surat pengangkatannya, meskipun kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung, begitu juga halnya yang terjadi di Desa Batu Gajah, peran Kepala Desa yang begitu besar ini sangat mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Desa Batu Gajah, terutama lokasi-lokasi mana saja yang hendak dilakukan pembangunan, terlepas pembangunan itu merata atau tidak sangat bergantung pada sikap bijak Kepala Desa.

Effendi (2002) menyebutkan bahwa pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar parainvestor mau menanamkan modalnya di daerah, karena apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibanding dengan yang lain.

Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang atau bahkan tidak ada akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya

dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakikatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain. Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti dengan jelas, terutama bagi penentu atau pembuat kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana peranan politik kepala desa dalam pembangunan infrastruktur dan apa pertimbangan kepala desa dalam memilih lokasi pembangunan infrastruktur di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadi suatu aspek fenomena sosial tertentu, sekaligus pula mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu melalui uraian dengan argumen yang jelas (Effendi, 2002). Oleh karena itu, penelitian deskriptif berupa menjabarkan atau menganalisis, maka sifat penelitian yang digunakan disini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu keadaan (obyek) dan di dalamnya terdapat upaya deskriptif, pencatatan dan analisis (Koentjaraningrat, 2007), yakni Peran Politik Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Batu Gajah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Politik Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

1. Mediator Pembangunan

Mediasi dapat dilihat bahwa Kepala Desa sebagai mediator, Kepala Desa sangat dibebankan dengan penumpukan pekerjaan atau tugas-tugas yang harus selesaikan secara kontinu. Dalam pelayanan-pelayanan masyarakat perlu adanya suatu pemilihan sistem pemerintahan yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang pada kenyataannya kepala desa pada posisi ini belum cukup meyakinkan dalam proses pelayanan dengan membagi dalam pemerataan pembangunan.

Kepala desa sebagai mediator pemba-

ngunan dalam pantauan peneliti yang terlihat dan nampak dalam aktivitasnya, kepala desa belum cukup meyakinkan dalam proses pembangunan. Dimana setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, kepala desa yang sebenarnya cukup antusias dalam menyelenggarakannya masih dianggap sebagian kalangan tidak netral dalam pemilihan lokasi pembangunan. Kegiatan pembangunan misalnya saat pembangunan jalan semenisasi dianggap sebagian masyarakat belum sesuai kebutuhan pembangunan itu, dengan kata lain masih ada beberapa jalan lain yang seharusnya terlebih dahulu disemenisasi sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Motivator Pembangunan

Motivator adalah pendorong, penggerak atau seseorang yang memberikan motivasi demi mencapai suatu tujuan yang menjadi harapan untuk dicapai dalam pembangunan. Adapun pengertian ini berhubungan dengan keberadaan kepala desa dalam kepemimpinannya dimana kepala desa pada hakekatnya harus mempunyai kemampuan untuk memunculkan kegairahan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan.

Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terseleenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka bisa untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara kepala desa serta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan. Jika hal ini dapat disadari dan dipahami dapat dipastikan upaya pembangunan akan tercapai melalui inspirasi-inspirasi kepada yang dipimpinya untuk bekerja secara bersama-sama, bertindak mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan dan didalam hal ini yang dipimpin akan mengalami proses pengem-

bangun kepemimpinan sehingga kelak mereka akan menjadi pemimpin yang handal.

3. Fasilitator Pembangunan

Memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang diperlukan itu dapat berupa merancang pembangunan dan aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu kehidupan masyarakat dalam desa serta mendanai pelaksanaan tersebut adalah segala bentuk aktifitas manusia (masyarakat dan pemerintah), di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah desa, baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik.

Implementasi ADD di Kabupaten Indragiri Hulu adalah upayadesentralisasi keuangan dari daerah kepada desa. Pengalokasian dana ADD kepada desa se Kabupaten Indragiri Hulu, termasuk Desa Batu Gajah disalurkan melalui rekening bank. Dana ADD diserahkan sepenuhnya kepada desa untuk dikelola dan digunakan. Perolehan dana ADD Desa Batu Gajah setiap tahun diinformasikan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi di tingkat kecamatan. Pengalokasian dan peruntukan dana ADD untuk BPD dan lembaga kemasyarakatan desa sudah diberikan acuan dalam Pedoman Pelaksanaan ADD yang ada. Nilai nominal mengacu pada prosentase yang telah ditentukan. Hal ini ditanggapi positif oleh Kepala Desa dan pimpinan lembaga kemasyarakatan di Desa Batu Gajah karena hal itu justru untuk memudahkan dan menghindari konflik antara pemerintah desa dengan lembaga yang ada.

4. Pelaksana Kebijakan

Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, persyaratan pertama bagi imple-

mentasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Winarno (2008) mengatakan jika ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami melainkan juga harus jelas. Agar implementasi ADD dapat berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berbagai kegiatan untuk sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.

Sosialisasi ADD dilakukan dengan tujuan agar semua pihak yang berkompeten tidak hanya memahami pengertian, maksud, tujuan dan teknis pelaksanaan ADD tetapi juga memahami keterkaitannya dengan perencanaan dan penganggaran. Namun realitasnya, dalam perumusan kebijakan dan implementasi ADD ada ketidaksesuaian dengan aturan di atasnya yaitu PP Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Ketidaksesuaian itu misalnya proporsi ADDM dan ADDP. Ketidakesuaian itu dapat berpengaruh negatif pada Implementasi ADD di Kabupaten Indragiri Hulu. Pengaturan yang sudah dilakukan adalah tentang pencairan, penggunaan, pelaporan dan pengendalian serta pengawasan kegiatan ADD. Tetapi belum dilakukan pengaturan yang jelas mengenai keterkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.

5. Fasilitator Pemberdayaan

Sumberdaya dapat merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik (Winarno, 2008). Sumber daya dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementator dan sumberdaya finansial (Subarsono, 2006). Adapun sumberdaya manusia tidak hanya dilihat dari secara kuantitatif tetapi juga secara kualitas. Dilihat dari sumber daya manusianya, Kecamatan Pasir Penyau dalam rangka pendampingan ADD ternyata kurang memadai. Terutama jika dilihat dari jumlah personil yang memadai pemahamannya tentang ADD. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya peran Tim Pendamping ADD Kecamatan Pasir Penyau dalam implementasi ADD. Sedangkan sumberdaya yang berupa

finansial yaitu dana operasional Tim Pendamping ADD Kecamatan Pasir Penyu tidak menjadi masalah yang berarti.

Dampak Politik Kepala Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur

1. Kesenjangan Pembangunan

Adanya asumsi pada latar belakang mengenai pembangunan di Desa Batu Gajah hanya terkonsentrasi di beberapa titik saja berdasarkan pantauan sementara dari penulis saat itu pada kenyataannya memang demikian terjadi. Bahkan berdasarkan penelusuran penulis, sejak terbentuknya pemerintah desa yang baru pada tahun 2011, telah direncanakan bahwa pembangunan hanya akan dilakukan pada dusun-dusun tertentu saja. Fakta adanya rencana pembangunan tidak merata ini penulis temukan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Batu Gajah Tahun 2011-2015.

2. Distrust Kelompok Masyarakat

Kesenjangan pembangunan yang terjadi dan tidak meratanya penentuan lokasi pembangunan di Desa Batu Gajah telah menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat di dusun 3 terhadap kepemimpinan kepala desa. Berdasarkan pantauan penulis di lapangan saat penulis berkunjung ke dusun 3 memang terdapat semacam pandangan sinis terhadap kepala desa saat ini yang menurut mereka ada semacam “dendam” politik sejak pemilihan kepala desa pada 2011 lalu.

Pilihan politik warga Dusun III ternyata harus dibayar mahal dengan konsekuensi tidak adanya pembangunan selama 4 tahun terakhir ini meskipun kondisi infrastruktur di dusun ini sudah memprihatinkan. Mengenai ketidakpercayaan warga Dusun III ini tergambar dalam wawancara penulis dengan salah seorang warga Dusun III yang rumahnya tepat berada di jalan semenisasi yang kondisinya cukup parah, warga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Desa yang dinilai telah berbuat tidak adil. Kondisi jalan yang demikian memprihatinkannya memang wajar jika masyarakat di Dusun III mengeluh terhadap pemimpinnya. Seharusnya

memang pilihan politik bukan lagi menjadi penghalang terhadap keberlangsungan pemerataan pembangunan.

3. Persepsi Positif dari Dusun Lain

Kepala desa merupakan pimpinan elit lokal dan pimpinan masyarakat yang mempunyai pengaruh bagi masyarakat. Kedudukan kepala desa sulit terpisahkan dari politik, untuk mempertahankan kekuasaan dan kestabilan politik yang dijalankan diperlukan adanya dukungan dari masyarakat desa.

Kepala desa sebagai penggerak politik dan pembangunan dan janji memberikan berbagai pembangunan infrastruktur di Desa Batu Gajah yang selama ini sangat didambakan masyarakat. Berbagai proyek pembangunan desa yang dijalankan kepala desa telah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, karena masyarakat dapat menikmati secara langsung pembangunan desa.

Salah seorang warga Dusun I bernama Tamliha mengatakan bahwa Kepala Desa merupakan sosok yang baik secara pribadi. Penilaian masyarakat akan keberhasilan kepemimpinan kepala Desa Batu Gajah sangat ditentukan sejauhmana pembangunan itu berjalan. Keterlibatan kepala desa dalam pembangunan dinilai masyarakat sangat bermanfaat dan merupakan hal yang wajar jika kepala desa memiliki orientasi arah pembangunan karena kepala desa ingin membawa masyarakat jauh lebih baik. Masyarakat desa sekarang dapat menikmati proyek pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah.

4. BPD Didominasi oleh Kepala Desa

Idealnya dalam sistem pemerintahan desa yang sering dianalogikan sebagai bentuk miniatur negara, posisi Kepala Desa akan selalu diimbangi dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pada prinsip dapat melakukan pengawasan terhadap berjalannya pemerintah desa. Begitu juga halnya di Desa Batu Gajah, BPD harusnya menyadari fungsinya sebagai *control* atas pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Sayangnya, sejauh ini BPD Desa Batu Gajah belum melaksanakan fungsi itu, pada

praktiknya BPD sering diasumsikan oleh pengurusnya sebagai pengikut atau kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Kepala Desa tanpa adanya upaya untuk berinisiatif dalam merumuskan kebijakan yang merata di tengah-tengah masyarakat Desa Batu Gajah.

Kesenjangan pembangunan, tidak meratanya pembangunan infrastruktur di Desa Batu Gajah terjadi juga disebabkan adanya semacam “pembiaran” oleh BPD yang seharusnya mengingatkan Kepala Desa akan perlunya keadilan dalam pembangunan. BPD dan segenap anggotanya malah terkesan tidak memahami kedudukannya sebagai wakil rakyat di Desa Batu Gajah. Setidaknya ini yang diungkapkan oleh seorang Tokoh Masyarakat yang tinggal di Dusun III. Ia mengatakan selama ini BPD hanya sebagai pelengkap tanpa berpikir untuk memperhatikan kepentingan warga Dusun III.

SIMPULAN

Peranan politik kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Batu Gajah dapat dikatakan memang sangat besar, sebab dalam perkembangan politik desa, seorang Kepala Desa adalah pemimpin politik tertinggi dan memiliki wilayah kekuasaan yang cukup besar karena Kepala Desa Batu Gajah dipilih secara demokratis dan secara langsung. Dengan peran politik yang besar itu, Kepala Desa Batu Gajah memegang kunci dalam pengambilan keputusan. Inilah yang kemudian menjadikan Kepala Desa Batu Gajah terkadang dapat diposisikan sebagai mediator pengambilan keputusan, sebagai motivator dalam pembangunan, dan sebagai fasilitator pembangunan. Peranan politik yang besar ini jika tidak dipegang oleh Kepala Desa yang berkompeten, besar kemungkinan akan terjadi penyelewengan kekuasaan.

Dampak yang terjadi akibat adanya peranan politik Kepala Desa Batu Gajah dalam pembangunan infrastruktur adalah *pertama*, terjadinya kesenjangan pembangunan antar dusun di desa Batu Gajah, dimana Dusun II sejak tahun 2011 hampir tidak ada pembangunan. *Kedua*, Persepsi negatif dari warga yang ada di Dusun III terhadap Kepala Desa akibat tidak adanya

pembangunan tersebut, *Ketiga*, adanya *distrust* (ketidakpercayaan) sebagian kelompok masyarakat terhadap Kepala Desa. *Keempat*, persepsi positif dari dusun lain yang pembangunan infrastrukturnya lancar sejak lima tahun terakhir ini. *Kelima*, BPD didominasi oleh Kepala Desa. Pada posisi ini BPD tidak menjalankan fungsinya sebagai perwakilan suara masyarakat, BPD justru hanya sebagai pengikut pembangunan yang telah ditentukan oleh Kepala Desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, Bactiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaindo Media dan Offset
- Haris, Syamsuddin (ed.), 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: YOI & PPW LIPI
- Hofstede, W.M.F. 1992. *Proses Pengambilan Keputusan di Empat Desa Jawa Barat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mas' oed, Mohtar dan Colin MacAndrew, 1991. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Prasadja, Buddy. 2005. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: CV. Rajawali
- Rasyid, Ryaas. 2004. *Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*, Jakarta: LP3ES
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumitro, Maskun. 2006. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Mandala
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita